

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan ekonomi global yang terus meningkat seperti saat ini, peran akuntansi semakin diperlukan. Menuju tata kelola yang baik (*good governance*), mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam hal pengelolaan keuangan salah satu upaya konkrit pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 21 Undang-undang tahun 2003 Tentang keuangan Negara yang memiliki dasar hukum yang mengacu pada sap.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PP No. 24 Tahun 2005 mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara mengamankan

pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU disahkan.

Dalam perkembangannya PP No. 24 Tahun 2005 disempurnakan lagi dengan terbitnya PP No. 71 tahun 2010. Dalam perbandingannya, ruang lingkup PP No. 24 Tahun 2005 meliputi SAP berbasis kas menuju akrual yang terdiri dari 11 pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual. sedangkan, ruang lingkup PP No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual yang terdiri dari 12 PSAP dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 oktober tahun 2010 dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.

Masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Putri (2011) dirjen Perbendaharaan Pada acara sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (Desember,2009) menegaskan bahwa tujuan dikembangkannya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk:

Pertama, memelihara komitmen para penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan disemua instansi pemerintah mengenai ketentuan transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan dengan kualitas baik dan dapat memperoleh opini tertinggi yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian); kedua, mendorong terwujudnya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta biasa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-Wilayah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan dan pasal 102 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggungjawabnya dan menyipakan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.

Berbagai penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah dilakukan, penelitian tersebut diantaranya penelitian Purwaniaty dan

subaweh (2008) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jendral Pendidikan Nasional, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebelum penerapan standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan Inspektorat Jendral Pendidikan Nasional belum akuntabel karena belum mampu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan belum memenuhi kebutuhan penggunaan yang akuntabel, tetapi setelah penerapan SAP laporan keuangan Inspektorat Jendral Pendidikan Nasional telah akuntabel. Susanti (2009) melakukan penelitian pada pemerintah kabupaten Langkat Sumatera Utara, dimana penyajian laporan keuangan daerah kabupaten tersebut sudah mengacu pada PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan baik itu tujuan lapotran keuanagan, komponen-komponen laporan keuangan, ruang lingkup dan periode serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, secara umum menunjukkan belum tertibnya pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Hal itu terlihat antara lain yaitu dari kelemahan pengendalian intern, ketidaktaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Fenomena yang terjadi di SKPD Provinsi Gorontalo yang menyebabkan belum sesuainya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan

keuangan di SKPD Provinsi Gorontalo adalah SDM yang berkecimpung di dalam penyusunan laporan keuangan dimana SDM tersebut masih banyak yang belum terlalu memahami tentang penerapan SAP karena masih kurangnya pelatihan-palatihan tentang penerapan SAP dan masih banyak ditemukan SDM yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan bidang ilmu mereka sehingga menyebabkan penerapan standar akuntansi pemerintahan belum maksimal sehingga memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap SKPD. Menurut Nuryanto, Berdasarkan pengungkapan permasalahan dalam hasil pemeriksaan BPK hal-hal yang masih harus diperbaiki oleh jajaran pemerintah daerah provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga memperoleh opini WDP, meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap perundang-undangan yaitu dengan menekan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan konsisten di semua SKPD yang ada, dan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Dimensi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada SKPD Provinsi Gorontalo).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu belum sesuai

penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan di SKPD Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan. Di samping itu hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk membandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis dari penelitian adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam membuat laporan keuangan sesuai standar yang diterapkan secara efektif dan efisien.